

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus masalah gizi kurang atau bisa diistilahkan dengan stunting merupakan kasus yang terjadi di setiap negara baik itu negara miskin, berkembang maupun negara maju sekalipun (Azizah et al., 2022). Peran strategis nutrisi dalam pertumbuhan dan perkembangan mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan pemberian nutrisi yang tepat _ membantu individu mencapai potensi yang cukup (Usada et al., 2021) (Probohastuti & Rengga, 2019). Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu dari adanya kasus ini salah satunya adalah penentu kualitas sumber daya manusia (Saputri, 2019).

Indikator keberhasilan pencapaian kesehatan berkesinambungan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*) salah satu indikatornya yaitu status gizi anak balita (Beal et al., 2018). Masa anak balita merupakan kelompok yang rentan mengalami kurang gizi, salah satunya adalah *stunting*. *Stunting* (anak kerdil) adalah salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita, dimana balita mengalami kondisi gagal tumbuh akibat dari kekurangan gizi kronis yang dipengaruhi oleh pola asuh ibu yang tidak baik sejak dalam kandungan terutama pada 1.000 hari pertama kelahiran hingga anak usia 2 tahun sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya dengan indikator TB/U z score <- 2 SD dari median standar WHO ANTHRO 2005 (Ramayulis, 2018).

Laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 2021, secara global terdapat 149,2 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting, 45,4 juta anak kurus, dan 38,9 juta anak mengalami kelebihan berat badan. Jumlah anak yang mengalami stunting mengalami penurunan di semua wilayah kecuali Afrika. Lebih dari separuh anak-anak yang terkena wasting tinggal di Asia Selatan dan Asia lebih dari tiga perempat anak-anak yang menderita gizi kurang yang parah.

Menurut *World Health Organization* (WHO), prevalensi balita pendek menjadi masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya 20% atau lebih. Karenanya persentasi balita pendek di Indonesia sangat tinggi dan merupakan masalah kesehatan yang harus di tanggulangi. Indonesia berada pada urutan ke 5 masalah stunting pada balita (WHO, 2022).

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada Tahun 2021, Kementerian Kesehatan RI melangsungkan launching hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka prevalensi stunting turun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022 artinya belum mencapai target WHO yang di bawah 20%. Hal yang sama terjadi pada kategori gizi obesitas yang sebelumnya 3,8% tahun 2021 turun menjadi 3,5% di tahun 2022. Namun permasalahan yang perlu diwaspadai adalah angka gizi kurang yang meningkat dari 17% tahun 2021 menjadi 17,1% tahun 2022 dan balita kurus dari 7,1% di tahun 2021 meningkat 7,7% pada tahun 2022. Hal ini akan berisiko dengan peningkatan stunting (Kemenkes RI, 2022).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengeluarkan lima pilar dalam penurunan stunting yaitu 1) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa, 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, 3) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa, 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Stunting merupakan permasalahan yang serius karena akan memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, stunting dapat meningkatkan risiko kematian bayi dan balita serta meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Stunting juga dapat menghambat pertumbuhan kognitif, perkembangan motorik, dan kemampuan bahasa (Manalor et al., 2023). Secara jangka panjang, stunting akan menimbulkan stunting lintas generasi serta meningkatkan risiko mengidap penyakit tidak menular di masa dewasa (Masturoh & Sumanti, 2022).

Pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting dalam RPJMN 2020-2024 prevalensi stunting di Indonesia menurun menjadi 14%. Target tersebut dapat tercapai dengan melibatkan peran multisektor dan memastikan adanya sinkronisasi program dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa (Halim, 2022). Langkah yang ditempuh untuk mempercepat pencapaian target tersebut

adalah dengan menentukan kabupaten/kota dan/atau desa tertentu sebagai fokus. Jumlah kabupaten/kota fokus ini akan diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh kabupaten/ kota di Indonesia (Sulistiyono & Jaenudin, 2021).

Upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam menangani masalah stunting sudah digalakkan tahun 2014 melalui program 1000 HPK sebagai salah satu upaya dalam menurunkan angka stunting dan dilanjutkan dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Data SSGI dilaporkan di Papua berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting Provinsi Papua mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 29,5% menjadi 34,6% di tahun 2022 melebihi standar nasional sebesar 21,6% di 29 kabupaten/ kota yang tersebar di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Target prevalensi balita sangat kurus dan kurus (stunting) sebesar 23% yang diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2023 (Dinkes Provinsi Papua, 2023).

Pada November tahun 2022 telah terbentuk Tim Pecepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua (TPPS) sebagai turunan dari kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam rekonsiliasi penurunan stunting di Provinsi Papua. Dinas kesehatan adalah unsur pelaksanaan pemerintah dalam bidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas kesehatan dalam upaya penurunan stunting terutama dalam intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif dengan capaian dapat mencapai 90% yaitu remaja putri menjalani skrining anemia, remaja putri

mengonsumsi tablet tambah darah, ibu hamil menjalani pemeriksaan kehamilan, ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah, ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat tambahan asupan gizi, pemantauan pertumbuhan balita, bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif, anak usia 6 – 23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi, bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap dan desa bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Capaian pelaksanaan 11 intervensi spesifik berdasarkan pedoman Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam penurunan stunting diperoleh cakupan yang tidak memenuhi target 90% yaitu skrining anemia pada remaja putri (17,8%), remaja konsumsi tablet tambah darah (25,28%), pemeriksaan kehamilan (k4) (32,97%), ibu hamil konsumsi tablet tambah darah (20,36%), pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kek (7,92%), pemantauan tumbuh kembang balita (32,78%), bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat asi eksklusif (56,42%), Tata Laksana Balita dengan Masalah Gizi (75,19%), peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi (55%) dan edukasi remaja putri, ibu hamil dan keluarga balita (30%). Sedangkan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang (151,%) telah mencapai target yang ditetapkan (Dinkes Provinsi Papua, 2023).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arumsari (2020) dalam evaluasi penanganan stunting di Dinkes Jawa Tengah berdasarkan input, proses dan output dalam manajemen pelayanan stunting berjalan dengan baik dan efisien. Mulai dari perencanaan program, pengorganisasian program, pelaksanaan program hingga pengawasan layanan program preventif

dilaksanakan berdasarkan visi dan misi yang telah disesuaikan dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Sehingga, dalam pelaksanaan pemberian pelayanan preventif kepada masyarakat sudah terstruktur dengan baik. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing tenaga kesehatan yang bertugas

Bedasari (2022) mengangkat evaluasi strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun belum berhasil menurunkan angka stunting di Desa Pongkar dari 2,76% tahun 2019, menjadi 7,6% tahun 2020, dan mengalami kenaikan 12,8% tahun 2021. Pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting belum berjalan dengan maksimal yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait stunting, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting, kurangnya keahlian, wawasan, dan SDM yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan yang membidangi dalam pencegahan dan penanganan stunting, kurangnya anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, ketidaktahuan masyarakat umum akan program pencegahan dan penanganan stunting tersebut.

Masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam penanganan gizi buruk karena belum semua kabupaten memiliki pusat perawatan/pemulihan gizi buruk, Kabupaten belum melatih puskesmas tentang asuhan gizi terstandar di puskesmas dengan petugas gizi, pelaksanaan entri pemantauan pelaksanaan gizi elektronik (e-PPG-BM) belum maksimal, pada pelacakan gizi buruk, terkendala alamat yang tercatat pada kasus gizi susah untuk dicari karena berpindah-pindah atau sudah di kebun/hutan.

Upaya untuk menghadapi hal tersebut adalah pelatihan asuhan gizi standard, koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mencatat kasus gizi buruk dengan mencantumkan nama dan alamat dengan jelas, distribusi PMT Balita kurus dan Bumil ke sasaran, Buffer stok PMT di Dinkes Provinsi, kabupaten/kota mengalikasikan dana APBD untuk PMT lokal, dan pembinaan ke kabupaten untuk peningkatan entri e-PPG-BM. Selain itu dari penggunaan anggaran dari pagu yang ditetapkan Dinkes Provinsi Papua dalam program perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp. 61.838.812.516 hanya mampu terserap penggunaan anggaran sebesar Rp. 44.192.626.626,52 atau sebesar 71,5% yang menunjukkan penggunaan anggaran tidak maksimal. Strategi Dinkes Provinsi Papua dalam mencapai target yang ditetapkan dalam penurunan stunting sebesar 23% di tahun 2023 perlu melakukan strategi yang tepat.

Berdasarkan masalah tersebut pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Penanganan Program Stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, dirumuskan penyebab yang dituangkan dalam rumusan pertanyaan penelitian adalah Menganalisis implementasi penanganan program stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis implementasi penanganan program stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui input meliputi sumber daya manusia, dana, metode/prosedur serta sarana dan prasarana.
- b. Mengetahui proses meliputi perencanaan penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pelaporan
- c. Mengetahui output meliputi capaian yang diharapkan dalam penananganan program stunting.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi referensi dan telaah akademis dalam penyajian masalah penanggulangan prevalensi *stunting* dan panduan untuk peneliti lain khususnya kalangan mahasiswa magister yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penanggulangan masalah *stunting*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk dapat memberi masukan yang berarti bagi pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk mengkaji lebih dalam masalah penanggulangan *stunting*, selain itu juga bisa dijadikan bahan refensi bagi Dinas Kesehatan dalam menanggulangi prevalensi *stunting* pada anak balita di Provinsi Papua.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Judul/Peneliti/Tahun	Metode dan Desain Penelitian	Variabel	Hasil
1	Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting Pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue/ Fatris Rudmini /2021	Deskriptif kualitatif	1. Strategi 2. Upaya	Strategi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue masih terbatas pada penyelenggaraan edukasi dan kegiatan pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) pada tenaga kerja kesehatan di tingkat kabupaten, kader posyandu dan puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue juga membentuk suatu kerja sama, yang dinamakan kerjasama lintas sektor yang saling berkoordinasi dengan beberapa dinas lainnya yang dinamakan dengan SEKBER (Sekretariat Bersama), yang melibatkan Bappeda, Dinas Pembangunan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan dan beberapa Dinas terkait lainnya dalam menanggulangi stunting di Kabupaten Simeulue. Adapun kendala yang menjadi sebab tidak dapat terselenggarakannya seluruh strategi Dinkes dalam penanggulangan stunting yaitu terbatasnya sumber pendanaan. dan juga pada pendataan bayi dan balita dari tenaga gizi yang masih minim. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya fasilitas posyandu seperti alat ukur dan alat timbang badan (dacing) yang belum tersedia sepenuhnya pada setiap posyandu.
2	Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar/Erina Fahzira/2021	Deskriptif kualitatif	1. Implementasi Kebijakan 2. Penurunan Stunting	Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar belum dapat berjalan maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum terlaksananya aspek Komunikasi, sumberdaya, diposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, dalam hal ini ada beberapa kendala dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di kabupaten adalah komunikasi terkait sosialisasi, tidak adanya tim khusus untuk melaksanakan kebijakan penurunan stunting sehingga tanggungjawab pegawai kurang dalam hal ini, masih kurangnya kesadaran masyarakat, kepemilikan tanah tidak berdomisili di Kampar.
3	Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Kepulauan	Deskriptif kualitatif	1. Strategi 2. Pengentasan stunting	Strategi Pemerintah dalam Pengentasan Stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah baik karena dilihat dari data yang ada dari Dinas Kesehatan dalam hal ini angka stunting yang pertahun menurun dan hal ini sudah baik, selanjutnya

	Sangihe (Studi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sangihe)/ Hayati Sofia Salmon/2021				keterlibatan pemimpin dalam hal ini selaku pihak lintas sektor yang ada mencakup pihak pemerintah kecamatan bahkan keluaran hingga ke kampung harus terus di tingkatkan. Yaitu selanjutnya di lihat dari setiap program sebagai program sudah berjalan dengan baik tapi ada sebagian program yang mencakup program dalam hal penggunaan aplikasi yang perlu terus bimbingan dari pihak BKKBN sendiri untuk pelatihan penggunaannya dan lebih baik menyediakan alternatif lain.
4	Strategi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Timur Kota Medan / Dhea Jayanti Pratiwi /2023	Deskriptif kualitatif	1. Strategi 2. Pencegahan Stunting		Penurunan prevalensi <i>stunting</i> di Kecamatan Medan Timur dari 10 menjadi delapan balita <i>stunting</i> tidak dipengaruhi oleh program D'GINTING ini melainkan bahwa anak tersebut sudah lebih dari lima tahun, secara pelaksanaan program D'GINTING kurang efektif namun tetap memberikan dampak positif pada pemenuhan asupan makanan pada anak namun program tersebut berjalan tiga bulan dan pelaksanaannya 14 hari disetiap bulannya, selain itu dalam program D'GINTING hanya berfokus pada perbaikan gizi dan nutrisi balita <i>stunting</i> , faktor penghambat pencegahan <i>stunting</i> di Kecamatan Medan Timur adalah ketidaksiapan anggaran dana, sarana dan prasarana, dan sosialisasi yang kurang maksimal.
5	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo/Fury Fidianti Putri /2022	Deskriptif kualitatif	1. Strategi Perintah desa 2. Stunting		Strategi pemerintah desa dalam pencegahan stunting belum tercapai, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya stunting, dan masyarakat kurang memahami tentang stunting. Dengan strategi pemerintah desa melakukan kegiatan pencegahan stunting dengan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pelatihan perbaikan gizi dan pijat akupresur.
6	Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting (Studi Kasus di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)/ Hafzana Bedasari/2022	Deskriptif kualitatif	1. Pelaksanaan program pencegahan 2. Stunting		Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun belum berhasil menurunkan angka stunting di Desa Pongkar dari 2,76% tahun 2019, menjadi 7,6% tahun 2020, dan mengalami kenaikan 12,8% tahun 2021. Pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di Desa Pongkar belum berjalan dengan maksimal yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait stunting, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting, kurangnya keahlian, wawasan, dan SDM yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan yang membidangi dalam pencegahan dan penanganan stunting, kurangnya anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, ketidaktahuan masyarakat umum akan program pencegahan dan penanganan stunting tersebut

7	Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Enrekang/ Normaisa/2020	Deskriptif kualitatif	1. Strategi 2. Laju penderita stunting	Strategi dinas kesehatan dalam menekan laju penderita stunting bisa dikatakan cukup baik. Karna stunting pada tahun 2018 telah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan harapan pada tahun 2019 ini dapat menurun lagi. hal ini dipengaruhi oleh strategi program yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Enrekang.
8	Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Era Pandemi Covid-19 / Wahyuni Arumsari/2020	Deskriptif kualitatif	1. Input 2. Proses 3. Output 4. Pencegahan Stunting	Manajemen pelayanan preventif program Nusantara Sehat yang dilaksanakan di Puskesmas Waitii berjalan dengan baik dan efisien. Mulai dari perencanaan program, pengorganisasian program, pelaksanaan program hingga pengawasan layanan program preventif dilaksanakan berdasarkan visi dan misi yang telah disesuaikan dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Sehingga, dalam pelaksanaan pemberian pelayanan preventif kepada masyarakat sudah terstruktur dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing tenaga kesehatan yang bertugas
9	Evaluasi Strategi Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Buton Selatan / Dwi Danti Fitria/2022	Deskriptif kualitatif	1. Evaluasi Strategi 8 Aksi Konvergensi Percepatan 2. Pencegahan Stunting	Evaluasi strategi pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting dalam menekan laju penderita stunting di Kabupaten Buton Selatan mengacu pada teori The Process of Evaluating Strategies menurut Fred R. David (2007), memiliki 3 aktivitas dasar evaluasi yang akan dilakukan, yaitu pengkajian ulang, pengukuran kinerja, dan pengendalian strategi.
10	Analisis Implementasi Penanganan Program Stunting Di Dinas Kesehatan Provinsi Papua/Elman Murib/Provinsi Papua/2023	Deskriptif kualitatif	1. Input 2. Proses 3. Output	Input sumber daya manusia dalam penanganan stunting di Dinkes Provinsi Papua memadai yang ditangani oleh Bidang Kesehatan Masyarakat seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat namun masih kurang terutama untuk tenaga gizi di masing – masing wilayah Dinkes Kab/Kota khususnya di Puskesmas, sumber dana BOK yang tidak terspesifikasi dalam intervensi spesifik dan sensitif, metode/prosedur terbatas karena kurangnya sosialisasi buku pedoman dalam penanganan stunting di puskesmas, sarana dan prasarana perlu adanya perencanaan dalam pemenuhan kebutuhan yang optimal dalam penanganan stunting. Proses perencanaan dilakukan dengan mengavaluasi hasil capaian penurunan stunting serta penganggaran melalui dana BOK yang diberikan dari perencanaan puskesmas namun kurang dalam perencanaan intervensi spesifik dan sensitif, pengorganisasi dilakukan bersama dalam Tim TPPS namun belum optimal karena kurangnya agenda kerja, pelaksanaan stunting di sesuai dengan SOP melalui buku pedoman. Output capaian stunting yang belum optimal mencapai target terutama dalam intervensi spesifik.